



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5200, 5201, (021) 3450959, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402  
SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- 3499 /PB/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kinerja  
Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018

17 April 2018

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
2. Para Kepala KPPN

Sehubungan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 16 Maret 2018 di Jakarta, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dilakukan evaluasi kegiatan melalui penyebaran kuesioner kepada para peserta.
2. Berdasarkan hasil kuesioner dimaksud, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Rakornas tersebut berjalan baik dan efektif. Namun demikian, terdapat masukan dari peserta Rakornas yang perlu di-highlight terkait dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, yaitu perlunya sinergi dan peran aktif pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja di unit kerja Ditjen Perbendaharaan.
3. Masukan dari peserta Rakornas tersebut sejalan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Lima Prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO), yaitu:
    - 1) menggerakkan perubahan melalui peran kepemimpinan;
    - 2) menerjemahkan strategi ke dalam kerangka operasional;
    - 3) menyelaraskan organisasi dengan strategi;
    - 4) cara memotivasi untuk menjadikan strategi sebagai tugas seluruh pegawai, dan
    - 5) menjadikan strategi sebagai proses perbaikan yang berkelanjutan.
  - b. Dari hasil Reviu Pengelolaan Kinerja dan Survei SFO Tahun 2016 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan memberikan rekomendasi perbaikan implementasi pengelolaan kinerja, antara lain agar dilakukan peningkatan peran aktif seluruh jajaran pimpinan dalam pengelolaan kinerja.
  - c. Sedangkan, dari hasil Reviu Pengelolaan Kinerja tahun 2017 pada Ditjen Perbendaharaan, Biro Cankeu Setjen Kemenkeu memberikan rekomendasi antara lain agar dilakukan peningkatan pemahaman pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai melalui edukasi yang lebih efektif dan berkesinambungan.
4. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan hasil Asistensi Pengelolaan Kinerja yang diselenggarakan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan pada beberapa Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN sebagai pimpinan unit kerja, agar memiliki *mindset* dan komitmen bahwa pengelolaan kinerja adalah bagian dari *strategic management* (bukan hanya administrasi), sehingga dapat lebih berkontribusi secara proaktif dalam pengelolaan organisasi yang berfokus pada strategi
  - b. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN perlu menunjuk pelaksana dan tandem yang dedikatif dan kompeten untuk membantu tugas teknis pengelolaan kinerja.
  - c. Kepala Kanwil DJPb dan Kepala KPPN agar memiliki cara pandang yang menyeluruh (*helicopter view*) dalam unit kerjanya, sehingga dapat memberikan arahan yang konkret dan komprehensif dalam pelaksanaan tugas unit kerja.

- d. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar tetap secara konsisten melaksanakan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Ditjen Perbendaharaan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5621/PB/2017 tanggal 20 Juni 2017 hal Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017.
- e. Kepala Kanwil DJPb agar memastikan kalender kegiatan yang telah disusun mendapat dukungan alokasi pendanaan secara optimal, termasuk kegiatan pengelolaan kinerja organisasi. Selain itu, Kepala Kanwil DJPb agar mengkoordinasikan sinergi antar unit di Kanwil DJPb dalam rangka pelaksanaan tugas supervisi Kanwil DJPb, antara lain dengan keterlibatan unsur pengelola kinerja organisasi Kanwil DJPb dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Seksi Supervisi Proses Bisnis pada Kanwil DJPb.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,



*Marwanto*

Marwanto Harjowiryo 4  
NIP 195906061983121001